



SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI PASCA COVID-19 DAN KONDISI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI TULUNGAGUNG

*Dede Nurohman**, *Abd Aziz***, *Moh. Farih Fahmi****

ABSTRAK:

Dampak COVID-19 sangat terasa terlebih sektor ekonomi. Upaya pemerintah dalam menghadapi virus ini mulai pemberian stimulasi ekonomi hingga himbauan sosial dalam bentuk; social distancing, PSBB, larangan mudik, sampai new normal dimaksudkan agar keselamatan warga terjaga sekaligus sektor ekonomi tetap berjalan. Tulisan ini mengarahkan kajiannya pada bagaimana dampak ekonomi di Tulungagung dan langkah startegis apa yang seharusnya dilakukan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif berjenis library research dan bersifat inferential. Analisis data dilakukan dengan menggunakan content analysis. Literatur diambil dari berbagai sumber resmi, informasi, dan berita yang beredar secara online terkait ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Tulungagung masih belum bisa digambarkan secara pasti kondisi ekonomi setelah masa pandemi. Namun, untuk mempertahankan pertumbuhannya, Tulungagung dapat mempertimbangkan dua skenario, skenario dengan PSBB dan tanpa PSBB.

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19; Skenario Ekonomi; Tulungagung*

* Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulllah Tulungagung, email: de2nur71@gmail.com

** Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulllah Tulungagung, email: aziz_suci72@yahoo.co.id

*** Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulllah Tulungagung, email: fafarih@gmail.com

ABSTRACT:

The impact of COVID-19 is too felt especially in the economic sector. Government efforts in dealing with this virus began to provide economic stimulation to social appeals in the form of; social distancing, PSBB, prohibition of going home, until new normal policy is intended so that the safety of citizens is maintained as well as the economic sector continuesly grows. This paper directs his study on how the economic impact in Tulungagung and what strategic steps should be taken. The approach in this research is qualitative research in library research type. Data analysis was performed using content analysis. The results showed that in Tulungagung still could not be described with certainty the economic conditions after the pandemic. However, to maintain economic growth, Tulungagung can consider two scenarios, a scenario with PSBB and without PSBB.

Keyword: Covid-19 Pandemic; Economy Scenario; Tulungagung

PENDAHULUAN

Dewasa ini dunia digemparkan adanya virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang tinggal di belahan negara manapun di dunia. Virus ini berasal dari Wuhan Cina dan sudah menyebar lintas samudera. Menurut laporan WHO (World Health Organization), pada 18 April 2020, virus ini sudah menginveksi 2.164.111 orang dan membunuh lebih dari 146,198 orang serta sudah menyebar lebih dari 200 negara. Seiring dengan menyebarnya virus, angka tersebut diperkirakan akan meningkat secara berlipat. Virus yang dinamakan dengan *Coronavirus Infection Disease 19 (COVID-19)* menimbulkan dampak sangat kompleks dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan negara dan bangsa. Virus tersebut didefinisikan oleh ahli sebagai *Coronavirus is considered as one of the most infectious diseases which mainly occurs after contaminating the human with the rigorous acute syndrome of respiratory issues*¹ yang maksudnya adalah virus corona merupakan salah satu penyakit menular antar manusia yang paling berbahaya dengan sindrom akut parah pada masalah pernapasan.

Pada sekitar akhir Januari, Indonesia sudah merespon bencana global tersebut. Dalam sidang kabinetnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa

¹ Mohammad Waliul Hasanat et al., "The Impact of Coronavirus (Covid-19) on E-Business in Malaysia," *Asian Journal of Multidisciplinary Studies* 3, no. 1 (April 5, 2020): 85–90, <https://asianjournal.org/online/index.php/ajms/article/view/219>.

situasi tersebut dapat menjadi peluang bisnis untuk memperluas pangsa pasar ekspor Indonesia yang mencapai 16.6% di negara Cina ke negara lain. Demikian juga menjadi kesempatan untuk memutus ketergantungan negara dari produk impor. Memasuki bulan maret, pada saat pasien pertama warga Indonesia divonis terpapar positif COVID-19, pemerintah mendeklarasikan melawan virus ini.² Respon perlawanan cepat ini bisa dimaklumi, karena virus ini sangat ganas, agresif, dan menyebar sangat cepat. COVID-19 menjadikan manusia sebagai sumber transmisi utama penyebaran sehingga interaksi antar manusia menjadi lahan subur pengembangbiakan virus ini. Penyebaran terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin.³

Hingga 1 Juni 2020 telah menjangkiti sebanyak 26.940 orang dan menyebabkan 1961 warga Indoensia meninggal dunia (jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan penyebarannya yang belum berhenti hingga kini). Dampak COVID-19 ini bisa sangat luas dan kompleks meliputi; sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, dan pertahanan-keamanan.⁴ Dampak tersebut jika dilihat dalam perspektif secara global sangat terasa pada aspek ekonomi, khususnya pariwisata dimana ada kerugian sekitar 78% dari aktifitas pariwisata global. Hai ini merujuk pada hasil penelitian yang di rilis oleh WHO, yang mengatakan bahwa *By 5 March 2020, 41% of member businesses had registered cancellations including hotels, camp sites, gastronomy, car rental, activities, and destination marketing organizations. By 26 March 2020, 90% of member businesses had temporarily 78% of businesses reducing at least three quarters of the workforce.*⁵

² Perlawanan pemerintah terhadap virus ini ditegaskan melalui sembilan kebijakan, antara lain; memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas, memfokuskan kembali (refocusing) anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, menjamin ketersediaan bahan pokok di tiap daerah, program padat karya tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, menambah alokasi dana kartu sembako, mempercepat implemntasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena Penghentian Hubungan Kerja (PHK), membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan memberikan subsidi bunga KPR hingga masa angsuran 10 tahun.

³ Yu Han and Hailan Yang, "The Transmission and Diagnosis of 2019 Novel Coronavirus Infection Disease (COVID-19): A Chinese Perspective," *Journal of Medical Virology* 92, no. 6 (June 1, 2020): 639–44, <https://doi.org/10.1002/jmv.25749>.

⁴ Dampak tersebut dapat disebutkan antara lain; pada aspek sosial, interaksi antar individu dilakukan secara berjarak minimal 1 meter. Aspek politik, agenda pemilihan kepala daerah diundur menunggu situasi reda, poster dan baliho yang biasanya ramai di pinggir jalan berubah menjadi poster himbauan hidup sehat melawan virus, konsolidas politik tidak bisa dilakukan. Aspek ekonomi, juga terganggu, banyak karyawan perusahaan yang di-PHK, tempat-tempat keramaian bisnis ditutup.

⁵ Stefan Gössling, Daniel Scott, and C. Michael Hall, "Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19," *Journal of Sustainable Tourism*, 2020, 1–20, <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>.

Berdasarkan data penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara global sudah sangat mengkhawatirkan. Selain penelitian tersebut ada juga penelitian mengenai covid-19 yang menunjukkan bahwa dampak virus corona di NTB menunjukkan pada bulan April 2020 terdapat sebanyak 10.280 pekerja di sektor pariwisata dirumahkan oleh perusahaan.⁶

Dampak ekonomi secara khusus dapat disebutkan antara lain: menurunnya kegiatan konsumsi rumah tangga karena daya beli yang menurun, kegiatan investasi menurun, kegiatan ekspor dan impor juga menurun, dan juga kegiatan moneter. UMKM sebagai pilar penting dalam pertahanan ekonomi di sektor riil juga terganggu. Sektor ini biasanya tahan dari berbagai krisis. Pada saat krisis moneter 1997 sampai dengan 1998 dan juga saat krisis ekonomi global 2008, sektor UMKM ini masih bisa bekerja dengan baik memenuhi kebutuhan pasar. Namun pada situasi sekarang ini, sektor ini terkena dampak paling terasa. Karena mereka tidak bisa memproduksi karena masyarakat tidak mempunyai daya beli, masyarakat tinggal di rumah tidak bekerja. Karena itulah dampak ekonomi menjadi semakin luas di masyarakat. Situasi ini bisa membuat tingkat pertumbuhan ekonomi menurun drastis, bahkan bisa sampai pada nilai negatif dan menyebabkan perekonomian Indonesia semakin buruk karena salah satu indikator baik buruknya perekonomian disuatu daerah adalah dengan melihat tingkat pertumbuhannya.⁷

Dampak seperti ini dialami juga di tingkat lokal seperti Tulungagung. Dampak ini bisa dilihat dari perubahan pola perilaku kebiasaan dalam kegiatan ekonomi dan perubahan daya beli masyarakat. Data masyarakat yang terjangkit COVID-19 di Tulungagung relatif mengkhawatirkan, meskipun jika dibandingkan dengan jumlah di Surabaya masih terpaut jauh. Data masyarakat yang terjangkit di Tulungagung pada 1 juni 2020 sebanyak 64 jiwa dan hanya merenggut satu nyawa. Sedangkan di Surabaya sudah menjangkit 2633 jiwa dan merenggut nyawa warga Surabaya sebanyak 246 jiwa.⁸ Dengan jumlah kasus tersebut secara relatif Tulungagung juga akan berpotensi menghadapi ujian dalam hal ekonomi ketika melihat potensi COVID-19 yang cukup membahayakan di Tulungagung.

Ujian ekonomi ini di wilayah Tulungagung sejatinya sudah dirasakan, yang dibuktikan dengan aktivitas pemerintah kabupaten yang berusaha memberikan himbuan dan sterilisasi tempat yang biasanya digunakan

⁶ Sri Maryanti, I Gusti Ayu Oka Netrawati, and I Wayan Nuada, "Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Pada Perekonomian NTB," *Open Journal Systems* 14, no. 11 (June 2, 2020): 3497–3508, <http://ejournal.binawakya.or.id/index.php/>.

⁷ Maryanti, Gusti Ayu Oka Netrawati, and Wayan Nuada.

⁸ BPS Kabupaten Tulungagung, *Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019* (Tulungagung: Badan Pusat Statistik Tulungagung, 2019).

untuk berkerumun warga, misalnya warung kopi dan angkringan. Sterilisasi ini menjadikan pelaku usaha di Tulungagung semakin tidak mendapatkan kepastian. Satu sisi para pelaku ekonomi menyadari bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya, namun di sisi lain para pelaku usaha juga akan kesulitan memenuhi kebutuhannya jika tidak melakukan kegiatan ekonomi.

Pandemi COVID-19 tidak saja berakibat pada inveksi dan kematian tetapi menjadi malapetaka bagi ekonomi global. Oleh karena itu, penelitian terkait persiapan daerah dalam menanggulangi masalah ini menjadi sangat mutlak diperlukan. Tulisan ini ingin mengarahkan kajiannya pada apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat Tulungagung dalam menghadapi COVID-19 dan bagaimana mereka merespon *New Normal* ini dalam praktik bisnis di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan bersifat *inferential*, yang maksudnya adalah metode penelitian untuk masalah-masalah yang aktual yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁹

PEMBAHASAN

Situasi Ekonomi Tulungagung

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Tulungagung secara bertahap berpotensi menurunkan daya beli akibat ketidakstabilan ini. Padahal jika dilihat dari indeks harga konsumen yang menggambarkan dalam tingkat inflasi di Tulungagung sebelum adanya COVID-19 cukup terkendali. Tingkat inflasi tiga bulan sebelum kasus pertama tidak sampai angka 3% yaitu 2,98 % di bulan Februari, 2.96% di bulan Maret, dan 2.67% di bulan April.¹⁰ Dari data tersebut menunjukkan daya beli masyarakat Tulungagung masih tinggi tetapi ada potensi daya beli masyarakat turun akibat COVID-19. Asumsi ini didasarkan pada aktifitas perekonomian di Tulungagung yang melambat dan menyebabkan pendapatan pelaku ekonomi turun di bulan Mei sampai berakhirnya COVID-19. Maka dari itu sangat tidak mengherankan jika pemerintah masih berkeinginan agar ekonomi masyarakat Indonesia tetap berjalan dengan cara menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan dengan menetapkan kebijakan *New Normal*.

Ditetapkannya kebijakan *New Normal* oleh pemerintah yang diberlakukan secara efektif pada 5 Juni 2020. Kebijakan *New Normal* ini ditetapkan dengan tujuan agar aktivitas ekonomi bisa berjalan kembali dan penyebaran COVID-19 tetap terkendali. *New normal* adalah sebuah

⁹ Engkus, "Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat," LITIGASI 18, no. 1 (2017): 2442–2272.

¹⁰ Tulungagung, Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019.

himbauan pemerintah agar masyarakat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya dengan menerapkan protokol kesehatan; menjaga jarak aman, menggunakan masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan itu, *New Normal* menjadi sesuatu yang penting jika dilihat dari kacamata Tulungagung. Mengingat wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki tingkat kemandirian tinggi dalam diri warganya untuk bekerja dan berwirausaha.

Dampak COVID-19 bagi Perekonomian Tulungagung

Sikap yang diambil dalam menghadapi COVID-19 tentu harus dilakukan secara berhati-hati dan disikapi dengan penuh pertimbangan, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Keseimbangan antara informasi penyebaran virus dan dampaknya bagi sektor ekonomi sangat diperlukan. Dampak yang paling nyata dari ancaman virus ini adalah sirkulasi perdagangan di pasar Tulungagung yang menurun drastis. Terdapat 40 pasar tradisional yang tersebar di 19 kecamatan¹¹ yang artinya ada potensi ratusan pedagang tradisional kesulitan menjual barang dagangannya karena jumlah pembeli di pasar tradisional yang menurun. Dampak yang dialami oleh pedagang tersebut selain menurunnya jumlah pengunjung pasar juga dipengaruhi oleh model bisnis yang juga tradisional. Belum banyak pedagang pasar yang mampu beralih dari *offline system* ke *online system* yang pada akhirnya hanya mengandalkan pasar riil yang harus bertemu dengan pembeli secara fisik.

Ketergantungan sebagian besar penjual pada pasar riil menjadikan pedagang terpaksa mengurangi jumlah barang yang dijual, akibatnya pendapatan pedagang akan menurun dan daya belinya juga menurun. Jadi dampak COVID-19 ini bagi pedagang pasar jelas ada pada sektor ekonomi dan sosial. Muncul kesan pedagang yang tidak takut dengan COVID-19 dianggap membahayakan warga lainnya akibat memaksa untuk bergadang di pasar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri baik bagi pemerintah daerah dan bagi semua pihak untuk meminimalisir dampak covid-19 secara terukur dan tidak banyak merugikan pedagang. Apalagi jika pemerintah Tulungagung menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maka dampaknya akan lebih berat bagi pedagang di pasar tradisional.

Dampak adanya COVID-19 ini juga dialami oleh para pelaku ekonomi informal. Maksud dari pelaku ekonomi informal adalah pelaku ekonomi yang kegiatan ekonominya tidak terlacak dan tidak dilaporkan kepada pemerintah.¹² Sehingga virus corona bagi pelaku ekonomi informal akan

¹¹ Tulungagung.

¹² Alisjahbana, *Urban Hidden Economy* (Surabaya: Lembaga Penelitian ITS, 2003).

memberikan dua dampak berat, pertama tidak mendapatkan penghasilan, dan kedua tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah serta berpotensi tidak diutamakan jika ada bantuan dari pemerintah. Salah satu contoh pelaku ekonomi informal adalah para pedagang kaki lima. Pelaku sektor ekonomi informal digambarkan oleh Schmoelders dengan istilah *schattentwirtschaft*, yang maksudnya adalah kegiatan ekonomi yang tidak pernah terliput secara resmi oleh pemerintah karena mereka hanya unit-unit kecil dari keseluruhan aktifitas ekonomi.¹³

Sektor transportasi di Tulungagung juga terdampak adanya virus corona. Data transportasi nasional menunjukkan bahwa ada penurunan sekitar 73% penggunaan transportasi di Indonesia.¹⁴ Hal ini berimbas juga di Tulungagung yang memaksa dua perusahaan otomotif utama di Tulungagung berhenti beroperasi, yaitu PO Harapan jaya dan PO Bagong. Berhentinya dua perusahaan transportasi tersebut menjadikan akses Tulungagung menuju arah Surabaya dan arah Malang terhenti. Selain perusahaan bus, transportasi kereta api juga harus terhenti mengingat PT KAI memberhentikan sementara pengoperasian kereta api. Sehingga penurunan penggunaan transportasi sebesar 73% tersebut juga termasuk dampak yang dialami oleh masyarakat Tulungagung dalam melakukan aktifitas ekonominya. Lumpuhnya sektor transportasi berdampak sangat serius bagi sektor pariwisata sebagai salah satu penopang pendapatan daerah. Lumpuhnya sektor ini secara global sudah dimulai sejak paruh pertama tahun 2020.

Dampak penurunan transportasi juga dialami ojek *offline* dan ojek *online* akibat berhentinya dua perusahaan transportasi besar di Tulungagung. Pada fase sebelum pandemi ojek *offline* dan ojek *online* cukup berkembang mengingat mobilitas warga menuju Tulungagung sangat tinggi, dan dimasa pandemi ini kedua jenis ojek tersebut mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan aturan *Work From Home* (WFH) dan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Sehingga, dampak COVID-19 terhadap transportasi sangat dirasakan, belum lagi untuk jasa-jasa lainnya yang terkait dengan transportasi, misalkan warung makan dan warung kopi di terminal, jasa penitipan motor, dan jasa-jasa lainnya.

Virus corona selain memberikan dampak kepada sektor transportasi juga memberikan dampak pada sektor perbankan. Kebijakan pemerintah pusat kepada semua sektor lembaga keuangan untuk memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran kredit akan memberikan dampak yang

¹³ Alisjahbana

¹⁴ Katadata “Databox bisnis terdampak virus corona” Jakarta 2020, pada <https://databoks.katadata.co.id/>

sangat berbahaya di sektor perbankan dan lembaga keuangan nonbank pada saat masa keringanan berakhir, yaitu penundaan selama satu tahun. Jika melihat jumlah lembaga keuangan di Tulungagung maka yang berpotensi bermasalah terdapat 303 bank umum, 20 bank umum syariah, 64 BPR dan 20 Koperasi Unit Desa (KUD).¹⁵ Berdasarkan kebijakan tersebut, lembaga keuangan berpotensi kehilangan uang yang dikreditkan akibat belum ada kepastian apakah pada saat satu tahun selesainya penangguhan kreditur mampu membayarkan tagihannya.

Jumlah dana yang disalurkan oleh bank umum kepada nasabah pada tahun 2019 nominalnya sebanyak 58 miliar rupiah, atau sebesar 66% dari dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank yang nominalnya sebesar 880 miliar rupiah. Artinya, jika selama masa pandemi atau selama masa PSBB (jika ada) sampai pada masa *New Normal* masyarakat yang mempunyai pinjaman tidak mensikapi dengan baik akan mengakibatkan guncangan pada lembaga keuangan di mana ada 58 miliar rupiah yang berpotensi tidak kembali. Sehingga akan meningkatkan status *Non Performing Loan* (NPL)¹⁶ dan *Non Performing Fund* (NPF)¹⁷ bagi lembaga keuangan. Indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (hutang tidak dapat ditagih), dan solvabilitas (modal berkurang).¹⁸ Sehingga NPL dan NPF merupakan indikator kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit dan pembiayaan kepada bank.¹⁹

Tren NPL dan NPF perbankan di Tulungagung sebenarnya terlihat cukup baik sebelum masa pandemi. Data NPL pada dua bulan terakhir di tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 2.7% di bulan Januari dan Februari. Sedangkan untuk NPF pada dua bulan terakhir di tahun 2020 menunjukkan angka 3.64% pada bulan Januari dan sebesar 3,38% pada

¹⁵Tulungagung, Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019.

¹⁶Maksud dari NPL adalah tingkat kegagalan pembayaran kredit dari nasabah kepada bank melalui skema konvensional, atau menggunakan bunga dalam skema bank konvensional. Dalam bahasa yang lebih rinci bahwa NPL adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank.

¹⁷NPF adalah kegagalan pembayaran pembiayaan oleh nasabah kepada bank syariah melalui skema syariah. Dalam pengertian lain NPF dapat diartikan sebagai tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah dan sebagai indikator dalam menilai kinerja fungsi bank, di mana fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi.

¹⁸Deasy Dwiandayani, "Analisis Kinerja Non Performing LOAN (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi NPL," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 22, no. 3 (February 23, 2018).

¹⁹Yulya Aryani, Lukyutawati Anggraeni, and Ranti Wiliasih, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014," *Al-Muzara'ah* 4, no. 1 (July 10, 2016): 44-60, <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.44-60>.

bulan Februari tahun 2020.²⁰ Berdasarkan data tersebut menunjukkan indikasi bahwa tingkat kepatuhan nasabah dalam mengembalikan kredit cukup tinggi. Namun dengan adanya COVID-19 dan adanya pelonggaran pengembalian pinjaman oleh pemerintah pada bulan Maret memberikan kekhawatiran atas NPL dan NPL yang akan meningkat drastis mengingat ada potensi peningkatan gagal bayar nasabah dan mendorong NPL dan NPL pada kisaran 66%.

Persoalan lain yang muncul akibat COVID-19 juga dialami pada sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian terdampak dalam bentuk jatuhnya harga komoditas pertanian. Harga hasil pertanian di beberapa negara turun hingga 20%. Di Tulungagung jika melihat tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ada sekitar 310.081 ton padi yang dihasilkan oleh petani di Tulungagung.²¹ Asumsinya jika di tahun 2020 petani memproduksi jumlah padi yang sama maka jumlah 300an ton tersebut belum tentu akan terserap 100% di pasaran, yang maksudnya adalah ada penurunan pendapatan petani akibat padi yang telah diproduksi belum tentu dibeli oleh konsumen mengingat penurunan jumlah pengunjung di pasar tradisional. Situasi yang sama juga dialami sektor peternakan dimana ada 114.552.²² ternak yang berpotensi tidak terjual karena sulitnya menjual ternak pada saat hari raya Idul Adha pada bulan Agustus 2020 akibat pelarangan kegiatan keagamaan yang berpotensi mengumpulkan orang sehingga konsumsi masyarakat terhadap hewan ternak akan semakin sedikit.

Dampak COVID-19 pada sektor UMKM juga berpotensi menimbulkan masalah ekonomi yang cukup dalam. Dampak yang mengancam pada sektor ini adalah penghentian tenaga kerja dan para karyawan yang bekerja tidak efektif. Hal ini dikuatkan dengan jumlah UMKM di Tulungagung yang jumlahnya sebanyak 522 unit usaha kecil, 75 unit usaha menengah dan 4 unit usaha besar.²³ Dari data tersebut ada potensi dampak ekonomi yang akan dirasakan paling tidak bagi para pekerja di UMKM mengalami penurunan pendapatan akibat produktifitas ataupun penjualan yang menurun. Begitu juga dampak yang dialami pada sektor industri di Tulungagung dimana ada sekitar 678 industri yang rinciannya adalah 667 Industri tekstil dan 11 Industri marmer. Dampak pada sektor industri ini berpotensi dialami oleh sekitar 7.119 karyawan.²⁴ Artinya, ketika ada satu karyawan yang terjangkit COVID-19 maka lebih dari 7000 karwan akan berpotesi dirumahkan sehingga mengganggu produktivias industri

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019

²¹ Tulungagung, Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019.

²² Tulungagung.

²³ Tulungagung.

²⁴ Tulungagung.

dan mengurangi pendapatan para pegawai. Begitu juga yang dialami oleh industri marmer di Tulungagung yang biasanya mampu mengeksor marmer harus berhenti akibat adanya COVID-19 di negara tujuan ekspor, misalnya di Korea Selatan dan Tiongkok.

Dampak ekonomi akibat COVID-19 bagi perekonomian, khususnya di Tulungagung harus disikapi dengan baik. Perlu adanya kebijakan dan tindakan agar COVID-19 dapat dikendalikan dan kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan. Kegiatan ekonomi harus didasarkan pada kebutuhan dasar masyarakat mengenai makanan, keamanan, dan kesehatan sehingga para pelaku ekonomi tetap bisa berkegiatan dengan cara-cara sesuai protokol kesehatan dan menggunakan cara-cara virtual sebagai media berkegiatan ekonomi dan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi bagi warga Tulungagung.

Potensi Pengembangan Ekonomi Tulungagung

Potensi ekonomi di Tulungagung tentu sangat menjanjikan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tulungagung sebesar 5.08%, pada tahun 2018 sebesar 5.31% dan pada tahun 2019 sebesar 5.32%.²⁵ Perkembangan PDRB Tulungagung yang terus meningkat menunjukkan indikasi bahwa aktifitas ekonomi masyarakat terus meningkat, dilihat dari aspek konsumsi, produksi dan distribusinya. Namun, dengan adanya ancaman COVID-19 di Tulungagung PDRB terancam terjadi penurunan akibat produktifitas dan konsumsi masyarakat yang menurun. Sebagai upaya mempertahankan PDRB tentu harus dilakukan dengan menyesuaikan potensi ekonomi yang ada, misalnya pemanfaatan digital ekonomi dalam bisnis, membangun kemandirian desa.

Potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan secara efektif di masa pandemi dan *New Normal* adalah pemanfaatan digital ekonomi atau virtual ekonomi. Data nasional penggunaan *marketpalce*, atau *e-commers* selama masa pandemi terjadi peningkatan signifikan sebesar 69%.²⁶ Tentu angkat tersebut mencerminkan perilaku masyarakat Indonesia yang sudah sedikit demi sedikit berubah pada saat melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi yang berkembang pada masa pandemic adalah telekomunikasi, penyedia/vendor platform online, farmasi, produk kesehatan melalui penyesuaian platform bisnis berbasis online²⁷ sehingga

²⁵ Tulungagung.

²⁶ Katadata “Databox bisnis terdampak virus corona” Jakarta 2020, pada <https://databoks.katadata.co.id/>

²⁷ Taufik and Eka Avianti Ayuningtyas, “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online,” *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 22, no. 01 (April 30, 2020): 21, <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i01.389>.

menyebabkan aktifitas interaksi di pasar secara riil juga semakin sedikit karena masyarakat lebih memilih untuk membeli kebutuhannya dari rumah. Hal ini juga selaras dengan peningkatan jumlah pengguna *e-wallet*, atau dompet digital sebesar 65% karena *e-wallet* berkaitan langsung dengan belanja *online* masyarakat. Selain itu, peningkatan layanan digital juga terjadi peningkatan cukup besar di sektor kesehatan sebesar 41% dan pendidikan sebesar 39%.²⁸

Peningkatan dari sektor kesehatan disebabkan akibat merebaknya COVID-19 di Indonesia dan ketergantungan masyarakat Indonesia yang membutuhkan layanan kesehatan. Sedangkan peningkatan sektor pendidikan diakibatkan oleh peraturan pemerintah yang meminta proses pendidikan dilakukan di rumah. Sehingga kebutuhan akan referensi pendidikan secara digital menjadi lebih diminati. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menstabilkan ekonomi harus berorientasi pada empat sektor yaitu sektor pelaku usaha informal, transportasi, perbankan, dan pertanian dan peternakan. Misalnya pada sektor informal, pelaku usaha di Tulungagung lebih didorong untuk melakukan kegiatan ekonomi secara virtual, kemudian memaksimalkan industri konveksi di Tulungagung untuk memproduksi masker dan baju yang bisa melindungi diri dari potensi terinfeksi COVID-19.

Namun, data menunjukkan pelaku ekonomi yang memanfaatkan virtual ekonomi di Jawa Timur relatif sedikit. Pengguna *e-commerce* di Jawa Timur hanya sebesar 19%, dan yang tidak menggunakan *e-commerce* sebesar 81%.²⁹ Artinya para pelaku ekonomi di Jawa Timur masih sedikit yang menggunakan media *online* sebagai sarana berkegiatan ekonomi. Hal ini menjadi peluang bagi pelaku ekonomi di Tulungagung untuk memaksimalkan jalur *online* untuk memasarkan produk unggulannya. Pemanfaatan *e-commerce* bagi pelaku ekonomi Tulungagung bisa melalui *e-commerce* yang sudah tersedia dan familiar bagi masyarakat, seperti Bukalapak, Shopee dan Tokopedia, atau memanfaatkan StartApp lokal serta media sosial (medsos) yang sering digunakan oleh masyarakat Tulungagung. Hal ini tercermin dari penggunaan media sosial oleh remaja usia 16 sampai 24 tahun dalam penggunaan internet yang cukup menjanjikan. *E-commerce* dapat berkembang dengan baik pada situasi pandemi ini jika produk yang ditawarkan berasal dari dalam negeri. Beberapa produk import yang berasal dari luar negeri, khususnya China, akan terkena imbas. Karena beberapa pabrik besar di negara tersebut melakukan *lockdown*.

²⁸ Tulungagung, Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019.

²⁹ Tulungagung.

Penggunaan akses internet oleh remaja usia 16 sampai 24 tahun paling banyak dimanfaatkan untuk *browsing* rata-rata sebanyak lebih dari 400 menit dan medsos sebanyak 200 menit.³⁰ Berdasarkan data tersebut menunjukkan ada peluang bisnis melalui pemanfaatan digital ekonomi karena anak usia remaja menggunakan internet 600 menit per hari, atau sekitar 10 jam per hari. Belum lagi penggunaan internet untuk usia di atas 24 tahun. Berdasarkan data tersebut menjadi penegasan bahwa kegiatan ekonomi dimasa pandemi COVID-19 di Tulungagung bisa dimaksimalkan dengan cara pemanfaatan media *online* untuk berkegiatan ekonomi dalam situasi yang sangat terbatas dan rawan penularan COVID-19.

Untuk memaksimalkan digital ekonomi di Tulungagung perlu inisiatif dari StartApp lokal untuk mengambil peluang pasar karena StartApp lokal juga merupakan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan di Tulungagung. Pada masa pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum bagi StartApp lokal untuk berinisiatif mengambil alih pasar dan melakukan inovasi agar bisa diterima oleh masyarakat Tulungagung. Ada tiga StartApp yang berpotensi mampu mengambil pasar selama COVID-19 yaitu *sadean.co* yang merupakan *e-commers* yang dikelola oleh Center of Economic and Policy Studies (CEPS) IAIN Tulungagung yang memberikan fasilitas bisnis kepada mahasiswa untuk berlatih berwirausaha secara *online*. Kedua ada StartApp *waregin* yang memang fokus pada produk makanan dan minuman, dan yang ketiga ada *Gusjek*, yang merupakan aplikasi transportasi dan jasa antar barang di Tulungagung.

Tantangan StartApp lokal ini sebenarnya didukung dengan kecenderungan masyarakat Tulungagung yang membelanjakan sumber ekonominya untuk makanan, bahan makanan dan minuman. Hal ini didasarkan pada pengeluaran perkapita masyarakat Tulungagung rata-rata sebesar 447.334 ribu rupiah perbulan. Nominal pengeluaran tersebut merupakan 49% dari pendapatan masyarakat dan ditambah 10% untuk konsumsi rokok.³¹ Artinya peluang untuk berkembangnya StartApp lokal sangat terbuka, tinggal bagaimana StartApp selama masa pandemi dan bahkan nanti setelah era *New Normal* benar-benar berjalan secara efektif, bisa mempersiapkan diri dan sanggup berinovasi untuk menggaet pangsa pasar Tulungagung

Oleh karena itu untuk memberikan kepastian bagaimana perekonomian dan bisnis setelah pandemi COVID-19 ini sangat tergantung dari kemampuan beradaptasi para pelaku ekonomi di masa pandemi dan masa

³⁰ Katadata “Databox bisnis terdampak virus corona” Jakarta 2020, pada <https://databoks.katadata.co.id/>

³¹ Tulungagung, Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019.

New Normal agar ketika memasuki masa normal perekonomian bisa lebih baik. Namun, untuk memastikan baik atau tidaknya perekonomian pasca pandemi COVID-19 perlu adanya alternatif skenario pemulihan ekonomi di Tulungagung. Maksud dari istilah skenario dalam memahami dampak covid-19 ini adalah merupakan salah satu alat untuk merencanakan dan menganalisis masa depan secara strategis secara ideal dan imajiner³² yang tujuannya agar pelaku ekonomi lebih bersiap diri dalam menghadapi dampak COVID-19 yang mungkin terjadi saat memasuki masa normal setelah pandemi covid-19 berakhir.

Skenario Ekonomi Menghadapi COVID-19

Analisis mengenai situasi ekonomi dan bisnis pasca COVID-19 tentu tidak bisa digambarkan saat ini. Hal ini dikarenakan memang belum ada kepastian kapan wabah ini akan berakhir. Namun, yang pasti dari bisnis dan perekonomian pasca pandemi ini adalah sangat tergantung dari tindakan masyarakat Tulungagung selama masa pandemi dan masa *New Normal*. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan victor stojkosky yang mengatakan bahwa *known that in better economies there are greater trade interactions and people mobility, which may enhance the propagation of an transmitted disease*³³ yang maksudnya adalah perekonomian pasca COVID akan sangat tergantung pada mobilitas masyarakatnya, meskipun ada resiko penyebaran covid-19 di masyarakat. Sehingga untuk mencoba memahami situasi ekonomi pasca dan sebagai upaya mempersiapkan ekonomi pada situasi normal pasca pandemi akan digambarkan melalui dua skenario: yang pertama adalah skenario dengan PSBB dan skenario tanpa PSBB. Dasar skenario dengan adanya PSBB ini didasarkan atas meningkatnya jumlah positif COVID-19 di Tulungagung, sehingga ada kemungkinan pemerintah menerapkan PSBB, meskipun situasi tersebut sebisa mungkin ditekan dan dihindari. Alternatif skenario pertama dapat digambarkan sebagaimana berikut ini:



Gambar 1. Skema kondisi pandemi covid 19

Berdasarkan alur skema di atas mengenai ekonomi dan bisnis pasca pandemi akan melalui empat fase yang masing–masing fase terdapat langkah–

³²Yogantara Setya Dharmawan, “Skenario Masa Depan Untuk Sektor Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Pegawai Negeri Sipil,” Jurnal Teknologi Aliansi Perguruan Tinggi (APERTI) BUMN, vol. 1, 2018.

³³Viktor Stojkoski et al., “The Socio-Economic Determinants of the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic,” SSRN Electronic Journal, April 14, 2020, <http://arxiv.org/abs/2004.07947>.

langkah yang harus dilakukan semua elemen masyarakat Tulungagung. Jika dilihat fakta di lapangan, masa pandemi di Tulungagung per tanggal 1 Juni 2020 masih dianggap biasa. Sendi perekonomian masih tetap saja dibuka dan terkesan para pelaku ekonomi kurang mengindahkan protokol kesehatan. Misalnya saja dengan adanya dua supermarket terbesar di Tulungagung yang masih aktif beroperasi. Artinya dari satu sisi, pada masa pandemi di Tulungagung perekonomian masih bisa berjalan normal meskipun pasti ada penurunan jumlah pengunjung di mall. Jika ini berjalan terus dan protokol kesehatan tidak diindahkan maka berpotensi meningkatkan jumlah kasus dan menyebabkan kemungkinan PSBB kemungkinan besar akan terjadi.

Pada skenario pertama ini, warga Tulungagung harus bersiap untuk mematuhi pembatasan–pembatasan sosial yang diterapkan. Jika merujuk pada pelaksanaan PSBB di tiga daerah di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Malang, Gresik dan Sidoarjo ada sektor yang masih diperbolehkan beroperasi. Seperti supermarket dan minimarket yang menjual bahan pokok dan perlengkapan kesehatan, pasar tradisional yang dibuka dengan protokol kesehatan ketat, perkantoran seperti perbankan, angkutan umum dan ojek. Hal ini juga dikuatkan dengan payung hukum terkait penanganan covid-19 peraturan pemerintah no 21 pasal 4 ayat (1) tahun 2020 yang selaras dengan undang – undang nomor 6 mengenai karantina kesehatan pasal 59 ayat (3) tahun 2018³⁴ yang intinya adalah mengenai strategi pemerintah dalam menangani penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.³⁵ Berdasarkan dari data tersebut seandainya di Tulungagung secara resmi diberlakukan PSBB maka tidak akan beda jauh dengan PSBB yang terjadi kota-kota tersebut. Peluang kegiatan ekonomi tidak sefleksibel sebelum PSBB karena pergerakan warga sangat dibatasi. Sehingga dengan pembatasan sosial tersebut akan muncul dampak buruk bagi perekonomian dan perlu ada perubahan aktifitas selama masa PSBB agar perekonomian tidak turun secara signifikan.

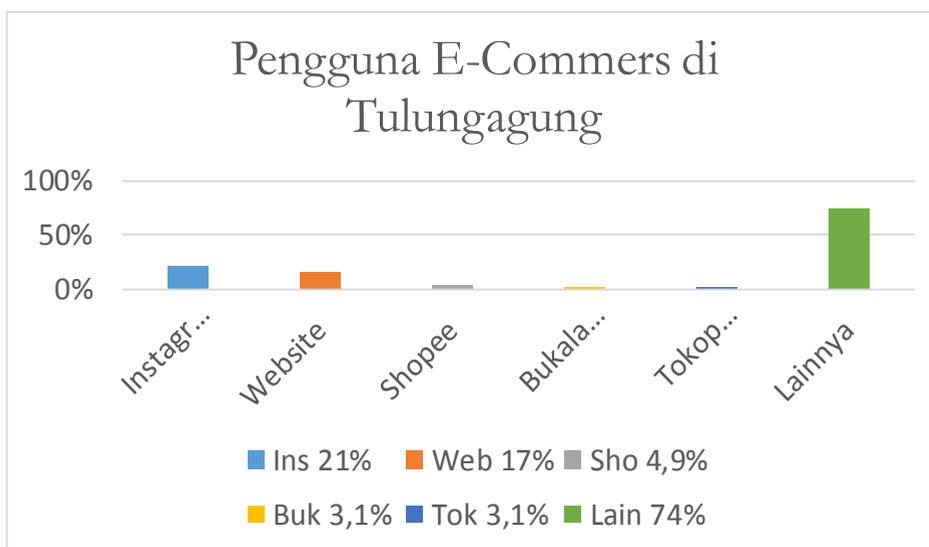
Alternatif aktivitas ekonomi selama masa PSBB dapat dilakukan dengan beberapa tindakan agar aktivitas ekonomi di luar sektor kebutuhan dasar dan kesehatan tetap bisa beroperasi. Salah satu aktivitas ekonomi yang bisa dikerjakan adalah dengan menjalankan konsep “mandiri ekonomi berbasis desa”. Konsep ini secara teknis adalah berkegiatan ekonomi di lingkungan desa, dan sebisa mungkin mengerjakan aktivitas tersebut di rumah. Hal ini

³⁴ Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (June 1, 2020): 240–49, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>.

³⁵ Muhyiddin, “Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (June 8, 2020): 240–52, <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.

didasarkan pada data industri tekstil sebanyak 667 unit yang sebagian ada di desa ini.³⁶ Sehingga warga yang terdampak PSBB bisa tetap beraktivitas dan mendapatkan pendapatan dari konsep mandiri ekonomi berbasis desa ini. Konsep ini bisa diterapkan di seluruh desa di Tulungagung sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dan dipasarkan melalui sistem *online* memanfaatkan StartApp lokal dan memanfaatkan medsos yang populer.

Masa PSBB merupakan momen paling menjanjikan bagi StartApp lokal untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini dikarenakan pembatasan gerak warga akibat PSBB bisa digantikan dengan masifnya peran StartApp lokal untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi warga Tulungagung. Beberapa StartApp tersebut adalah *sadean.co*, *waregin*, dan *gusjek* yang harus benar-benar berinovasi dan melakukan sosialisasi agar aktivitas bisnisnya bisa diketahui oleh pelaku ekonomi di Tulungagung. Selain berharap dengan StartApp lokal, warga yang melakukan kegiatan ekonomi dari rumah bisa memanfaatkan *e-commers* yang sudah ada. Penggunaan *e-commers* di Tulungagung secara spesifik akan digambarkan pada diagram berikut ini:³⁷



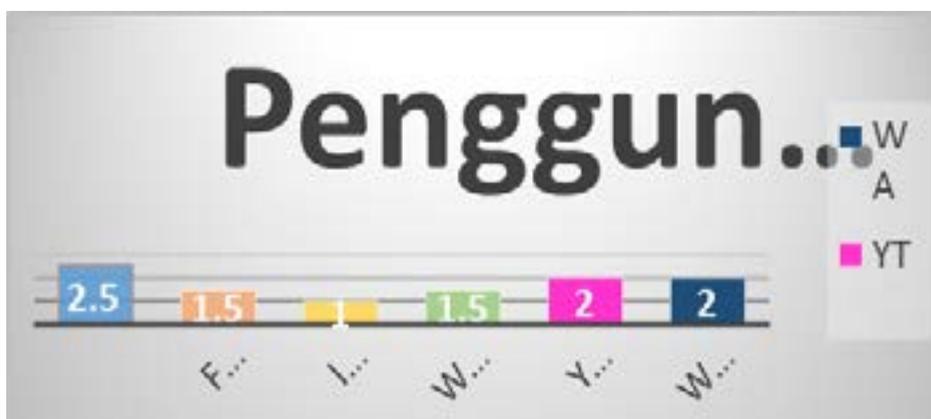
Gambar 2. Diagram Pengguna e-commers Tulungagung
Sumber: BPS Tulungagung

Diagram di atas menggambarkan bahwa pelaku ekonomi dalam memanfaatkan *e-commers* dalam kegiatan bisnis didominasi *e-commers* yang relatif tidak populer dengan persentase sebesar 74%. Artinya, dari

³⁶ Dinas Informasi dan Komunikasi (DINKOMINFO) "Tulungagung, 2019. Data dan Statistik ekonomi kabupaten Tulungagung tahun 2019" Tulungagung 2019.

³⁷ Tulungagung, Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019.

data tersebut ada peluang besar bagi StartApp lokal untuk bersaing di Tulungagung mengingat *e-commers* populer di Tulungagung kurang begitu diminati. Data di atas memunculkan harapan di masa PSBB bagi pelaku ekonomi di Tulungagung untuk bisa bertahan atau bahkan bisa lebih berkembang pada saat masa pandemi berakhir. Data itu juga bisa menjadi referensi bagi pelaku ekonomi untuk mempromosikan dan memasarkan produknya melalui digital ekonomi. Sebagai pertimbangan data pengguna terbanyak media sosial di Indonesia akan dipaparkan berdasarkan diagram berikut ini:³⁸



Gambar 3. Diagram Pengguna Medsos

Diagram di atas menunjukkan fakta bahwa 2.5 juta masyarakat Indonesia memilih Facebook sebagai media sosial paling populer di dunia maya. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku ekonomi di Tulungagung untuk mempromosikan dan menjual barangnya melalui Facebook yang penggunaannya paling banyak disusul oleh Youtube dan Whatsapp dengan pengguna sebanyak dua juta pengguna, kemudian disusul Facebook Masanger dan We chat sebanyak 1.5 juta pengguna dan di urutan keenam ada Instagram dengan total satu juta pengguna di Indonesia.

Pada fase *New Normal* ini fokus perekonomian difokuskan pada pemulihan sektor transportasi, jasa kesehatan, akomodasi, makanan dan minuman, informasi, komunikasi, dan industri pengolahan mengingat kelima sektor tersebut pada tahun 2019 berhasil mendorong PDRB sebesar 34% secara akumulatif.³⁹ Jika pada fase PSBB bisa dijalankan dengan baik maka pada fase *New Normal* tidak lagi pada tahapan memulai kembali,

³⁸Katadata "Databox bisnis terdampak virus corona" Jakarta 2020, pada <https://databoks.katadata.co.id/>

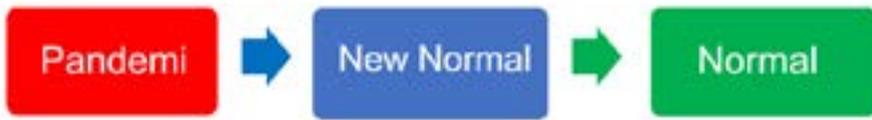
³⁹Tulungagung, Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019.

tetapi sudah fokus pada pengembangan apa yang sudah dilakukan selama PSBB, sehingga ekonomi bisa lebih stabil.

Upaya pemulihan ekonomi pada fase normal di Tulungagung didasarkan atas dua asumsi. Pertama, adalah jika dilaksanakan dengan maksimal dan kedua adalah tidak dilaksanakan dengan maksimal. Jika skenario satu bisa berjalan secara maksimal maka kemungkinan pada saat fase normal pasca COVID-19, situasi perekonomian lebih dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut berdampak pada angka PDRB yang turun sedikit, dikisaran 2% - 3%. Angka tersebut lebih kecil dari tahun 2019 akibat adanya PSBB dan penyesuaian di fase *New Normal* yang mengakibatkan kegiatan produksi dan konsumsi terkendala. Pada fase normal tingkat NPL dan NPF lembaga keuangan akan lebih bisa dikendalikan karena selama PSBB dan fase *New Normal* pelaku ekonomi sudah melakukan alternatif ekonomi dan mempunyai pendapatan. Sehingga ketika sudah masa penagguhan pembayaran hutang oleh pemerintah berakhir, pelaku ekonomi mampu membayar kredit, meskipun tidak 100% dari total nasabah.

Fase normal pada skenario satu jika asumsinya dilaksanakan dengan baik, maka menjadi momentum berkembangnya StartApp lokal. Sehingga pada fase normal para pelaku ekonomi lebih terbiasa dengan perubahan media dalam melakukan kegiatan ekonomi. Namun, jika asumsi skenario satu tidak dilaksanakan dengan maksimal maka akan ada konsekuensi yang buruk untuk perekonomian saat memasuki fase normal. Konsekuensi tersebut akan menimbulkan masalah baru dalam yaitu tingkat PDRB Tulungagung akan semakin jatuh karena kegiatan konsumsi dan produksi terhenti, kemudian NPL dan NPF akan semakin tinggi karena nasabah belum mampu membayar akibat tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dan lembaga keuangan akan menghadapi resiko rugi sebesar 49% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebesar 880 miliar. Dampak tersebut juga berpengaruh pada StartApp lokal akan gagal berkembang, karena tidak ada inovasi yang baik selama masa pandemi yang akibatnya adalah ketika sudah dalam fase normal maka pelaku ekonomi akan lebih nyaman dengan model bisnis lama, seperti pada saat sebelum adanya COVID-19. Artinya, dalam situasi tersebut menjadikan StartApp lokal terancam gulung tikar karena tidak diminati oleh pelaku ekonomi.

Situasi ekonomi dan bisnis pasca pandemi juga bisa digambarkan melalui Skenario Kedua dalam menghadapi COVID-19 di Tulungagung. Skenario kedua ini fokus pada pelaksanaan perekonomian tanpa adanya PSBB. Untuk memahami skenario dua ini, maka proses pelaksanaannya akan digambarkan pada skema berikut ini:



Gambar 4. Skema Kondisi Covid 19

Skenario kedua yang digambarkan pada skema di atas menegaskan bahwa dalam menghadapi bahaya COVID-19, perekonomian bisa dilaksanakan tanpa adanya PSBB. Skenario ini dilaksanakan atas dasar jika persebaran COVID-19 di Tulungagung bisa dikendalikan dengan baik dan langsung menuju fase *New Normal* dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pada skenario kedua ini adaptasi kegiatan ekonomi hanya dilakukan di fase pandemi sehingga ada dugaan ketika fase *New Normal* pelaku ekonomi hanya memodifikasi perilaku saja, bukan pada modifikasi ekonomi. Masyarakat yang biasanya melakukan kegiatan ekonomi di pasar tanpa jarak dan tanpa masker pada fase ini wajib menjaga jarak dan memakai masker. Artinya hanya terjadi modifikasi perilaku namun tidak ada perubahan apapun pada tindakan ekonominya. Modifikasi perilaku ini meliputi tiga hal, yaitu; *social distance, personal hygiene, and protective mask*. Trilogi ini merupakan mantra ampuh yang digunakan negara Eropa dan negara lainnya. Dengan tidak adanya modifikasi ekonomi maka kemungkinan berkembangnya StartApp lokal diprediksi akan semakin berat karena di Tulungagung tidak ada PSBB dan tidak ada ketergantungan pelaku ekonomi terhadap startApp lokal dan lebih memilih menggunakan cara konvensional dengan sedikit menyesuaikan protokol kesehatan.

Tidak adanya PSBB di skenario kedua ini memunculkan respon pelaku ekonomi dalam fase *New Normal* akan terkesan biasa saja. Namun, agar skenario dua ini memberikan dampak yang baik pada saat fase normal maka pelaku ekonomi harus merespon dengan sikap yang lebih baik. Perlu adanya kesadaran pelaku ekonomi untuk melakukan cek rutin kesehatan demi kebaikan bersama, meskipun kendalanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk cek kesehatan relatif tidak murah. Dengan begitu harus ada perlindungan dan pernyataan medis melalui sertifikasi pelaku usaha agar dalam melaksanakan kegiatan ekonomi antara penjual dan pembeli merasa sama-sama aman dan nyaman. Namun perlu ada penyesuaian akibat adanya virus COVID-19 di Tulungagung dengan melakukan inovasi usaha agar lebih siap dalam menghadapi fase normal.

Gambaran fase normal pada skenario kedua ini adalah yang pertama masyarakat secara psikologis akan lebih nyaman dan tidak terganggu

akibat adanya COVID-19. Kenyamanan psikologis tersebut disebabkan karena tidak adanya PSBB dan tidak ada peningkatan signifikan kasus COVID-19 di Tulungagung. Pada fase ini juga memberikan dampak yang positif bagi banyak pelaku ekonomi karena kegiatan ekonominya tidak berhenti secara total. Hal ini berbeda dengan skenario pertama yang harus ada pemberhentian total di beberapa sektor ekonomi kecuali untuk kebutuhan dasar manusia dan kesehatan. Dengan tidak adanya PSBB yang menyebabkan perekonomian tidak harus berhenti maka pelaku sektor ekonomi informal lebih bisa terselamatkan. Dampak tersebut juga memberikan jaminan bahwa sektor lembaga keuangan akan lebih aman dan dapat mengendalikan angka NPL dan NPF agar tidak terlalu jatuh. Hal ini disebabkan karena pelaku ekonomi yang menjadi nasabah lembaga keuangan akan lebih mampu dalam membayar cicilan kredit setelah masa penagguhan kredit berakhir karena kegiatan ekonomi tidak mati total.

Dengan situasi seperti itu maka harapannya adalah disparitas ekonomi akan lebih terjaga, jangan sampai kemudian pada fase pandemi dan *New Normal* pelaku ekonomi diminta untuk menjaga jarak sosial, atau *physical distancing* kemudian memicu *economic distancing* di Tulungagung. Hal tersebut harus diantisipasi supaya di fase normal, kegiatan ekonomi kembali dapat mendorong angka PDRB Tulungagung tahun 2020 tetap stabil pada kisaran 4 sampai 5 persen di akhir tahun. Untuk tetap menjaga sirkulasi ekonomi yang baik di Tulungagung di masa pandemi harus diimbangi dengan revolusi budaya yang kuat. Hal ini sejalan dengan teori Kunzigg yang mengatakan bahwa *Building a circular economy will require an enormous cultural shift on the scale of the Industrial Revolution*, yang intinya harus ada perubahan budaya pada industri atau perekonomian.

Berdasarkan kedua skenario tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam menghadapi COVID-19 perlu pendekatan positif dalam menggambarkan situasi ekonomi bisnis di Tulungagung pasca pandemi. Pendekatan positif ini lebih fokus pada analisis mengenai situasi ekonomi yang lebih riil atau fakta ekonomi yang terjadi di Tulungagung. Pendekatan positif tersebut jika dilihat dari aspek teoritik maka sesuai dengan teori *evidence-base Policy*. Teori yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada bukti lapangan.⁴⁰ Model diagnosis dalam ilmu kesehatan dapat digunakan dalam ilmu sosial untuk mengecek data di lapangan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara akurat.⁴¹ Adanya

⁴⁰ Maria Gabby, "Prinsip Evidence Based Policy Making dalam Konteks Audit Pendahuluan Operasional BPJS Kesehatan," *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, vol. 2, May 1, 2015.

⁴¹ Adrian F. M. Smith, "Mad Cows and Ecstasy: Chance and Choice in an Evidence-Based Society," *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society)* 159, no.

dua skenario untuk menggambarkan kondisi pasca COVID-19 dan didukung dengan data dan fakta di lapangan menjadikan dua skenario tersebut bisa dipertimbangkan untuk dijadikan rujukan dalam menjalani kegiatan ekonomi selama masih ada ancaman virus COVID-19 di Tulungagung

Dampak COVID-19 bagi Perkembangan Industri Keuangan Islam

Pada dasarnya semua lembaga bisnis, syariah non syariah, terdampak secara serius oleh COVID-19. Lembaga keuangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan adanya potensi kerugian yang cukup parah bagi lembaga keuangan. Hal ini juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah (LKS) di Tulungagung. Berdasarkan data dari badan pusat statistik menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di Tulungagung berjumlah 20 untuk bank umum syariah, 64 BPRS, dan 48 KSPPS.⁴² Sehingga dengan jumlah sebanyak itu dan melihat kondisi pandemi di kabupaten tulungagung akan sama dengan kondisi yang dialami lembaga keuangan konvensional yaitu adanya potensi kemacetan dalam pengembalian uang pembiayaan usaha. Mekanisme yang berbeda dari lembaga keuangan syariah dan keuangan konvensional sedikit memberikan ketenangan kepada para pelaku usaha yang memanfaatkan lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan ada cara yang berbeda dalam mensikapi resiko bisnis yaitu menanggung bersama resiko ekonomi yang dialami oleh pelaku usaha dengan pembiayaan melalui LKS.

Lembaga keuangan syariah di Tulungagung sebagian berbentuk lembaga keuangan mikro. Sebelum masa pandemi, lembaga ini berkontribusi lebih nyata bagi sektor riil dan menjangkau luas para pelaku ekonomi kecil. Karena itu jika dibandingkan dengan lembaga keuangan berbentuk bank, dampaknya tidak begitu terasa. Hal ini berdasarkan dari data BPS yang menunjukkan nasabah dari salah satu lembaga keuangan syariah, yaitu KSPPS di Tulungagung hanya sebanyak 10.952 orang di tahun 2020.⁴³ Hal ini sangat berbeda jauh dengan nasabah perbankan yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah nasabah LKS selain bank. Berdasarkan data tersebut mengindikasikan bahwa lembaga keuangan syariah yang paling terdampak ada disektor perbankan syariah karena jumlah uang yang didistribusikan untuk pembiayaan lebih banyak dan berpotensi meningkatkan NPF selama masa pandemi. Selain itu, warga Tulungagung yang membutuhkan modal tidak membutuhkan dana banyak sehingga lebih ideal untuk mengakses lembaga keuangan syariah mikro, seperti BMT dan Koperasi

3 (May 1, 1996): 367, <https://doi.org/10.2307/2983324>.

⁴²BPS Kabupaten Tulungagung, *Tulungagung Dalam Angka 2020* (Tulungagung: CV. Azka Putra Pratama, 2020).

⁴³BPS Kabupaten Tulungagung.

syariah. Sehingga sirkulasi dana yang disalurkan tidak besar dan potensi meningkatnya *non performing loan* (NPF) juga kecil.

Masa pandemi covid 19 di Tulungagung tidak menjadikan lembaga keuangan syariah menjadi vakum. Lembaga-lembaga tersebut masih tetap beroperasi tanpa mengurangi jam kerja dan juga tidak mengurangi jumlah karyawan, mengisitirahatkan sementara beberapa karyawan, atau mengatur jam kerja mereka secara bergantian. Hal ini mengindikasikan bahwa dimasa pandemi lembaga keuangan syariah mikro masih berupaya untuk mendorong warga Tulungagung untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masa pandemi. Meskipun resiko pasti yang dihadapi adalah adanya keterlambatan pembayaran pengembalian pembiayaan, dan mengalami adanya kerugian akibat pelaku ekonomi yang dibayai tidak mendapatkan keuntungan sehingga tidak ada nisbah yang dibagikan kepada LKS. Hal ini wajar karena usaha mereka lesu seiring situasi makro ekonomi yang tidak bergairah karena COVID-19. Situasi di Tulungagung yang cukup meresahkan akibat banyaknya warga yang terserang covid-19 sehingga menyebabkan perilaku konsumsi mereka berubah. Kebutuhan – kebutuhan yang biasanya dipenuhi dipasar bergeser kepasar online, yang menyebabkan pelaku ekonomi di tulungagung yang mayoritas masih offline mengalami kerugian karena tidak ada penjualan. Kelesuan ekonomi yang dialami tentu berdampak pada NPF lembaga keuangan di tulungagung khususnya lembaga keuangan mikro syariah, meskipun relatif kecil.

Kelesuan ekonomi yang dialami oleh pelaku ekonomi di Tulungagung disikapi dengan serius oleh lembaga keuangan mikro syariah. Beberapa lembaga keuangan mikro syariah mempunyai cara sendiri-sendiri dalam menyikapi problem keterlambatan pembayaran angsuran ini. BMT Nusantara Umat Mandiri, misalnya, mempunyai kebijakan cukup humanis, memberikan toleransi penundaan pembayaran selama dua kali angsuran. Jika mereka masih tetap tidak mampu maka hanya membayar margin saja. Bahkan jika terjadi terjadi kredit macet dan tidak bisa dicarikan solusi, maka BMT ini bekerjasama dengan NU (Nahdhatul Ulama) Care, LAZISNU (Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdhatul Ulama), atau Koin NU (Nahdhatul Ulama) agar lembaga sosial tersebut bisa membantu memberikan dana untuk menutup tanggungan mereka. BMT Sahara juga demikian. Pada situasi seperti ini, lembaga ini menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan, memberikan kemudahan dengan membayar semampunya. Demikian juga BMT Baitul Izza. BMT ini terjun ke lapangan untuk melakukan pendampingan khusus dan menetapkan tahapan yang umum dilakukan lembaga keuangan, yaitu; *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *negosiasi*. Semua dilakukan atas dasar kekeluargaan.

Alternatif strategi dalam menghadapi covid 19 baik dengan asumsi adanya PSBB dan non PSBB, menjadi penting bagi pelaku ekonomi di Tulungagung untuk disikapi dengan baik. Asumsi pertama, jika terjadi kebijakan PSBB di Tulungagung maka salah satu alternatif solusi yang bisa digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah dengan cara digitalisasi lembaga keuangan mikro. Praktik yang sudah ada adalah adanya financial technology (Fintech) di lembaga keuangan non syariah. Sehingga jika terjadi PSBB di Tulungagung langkah yang harus diambil oleh lembaga keuangan syariah mikro adalah membuat fintech yang bergerak dengan landasan syariah Islam. Sekaligus memberikan edukasi bahwa lembaga keuangan syariah mikro menjadi pilihan ideal bagi pelaku ekonomi muslim di Tulungagung. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus mampu mereduksi nisbah untuk pelaku ekonomi. maksud dari reduksi nisbah ini adalah memberikan diskon “bagi hasil” yang harus diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini dikarenakan dalam prinsip ekonomi syariah ada aspek *maslahat* dalam setiap transaksinya. Sehingga tidak memebani pelaku ekonomi di masa pandemi, hal ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan preferensi muslim di Tulungagung yang banyak masuk di lembaga keuangan konvensional. Dalam situasi tersebut pelaku ekonomi akan diarahkan untuk memilih mekanisme kegiatan ekonomi yang lebih aman dan menguntungkan, atau disebut dengan *trade off*.⁴⁴

Asumsi kedua untuk situasi ekonomi di kabupaten Tulungagung adalah asumsi tidak adanya PSBB. Berdasarkan informai dan paparan sebelumnya menjelaskan bahwa jika tidak terhdjadi PSBB maka kegiatan ekonomi di Tulungagung akan terkesan biasa saja. Ada dua hal yang menjadi alasan sikap pelaku ekonomi yang terkesan tidak terdampak covid-19. Pertama adalah karena ada anggapan di tulungagung kasus infeksi covid-19 dapat dikendalikan sehingga pelaku ekonomi akan tetap beraktivitas dipasar *offline*. Kedua adalah adanya pertimbangan ekonomi agar tidak terjadi depresi ekonomi yang lebih parah. Alasan kedua ini mengindikasikan pemerintah Tulungagung akan bersikap moderat, berusaha menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi, meskipun resikonya adalah ancaman covid-19 yang lebih parah. Sehingga berdasarkan situasi yang terjadi di tulungagung dan kemungkinan jika tidak terjadi PSBB di Tulungagung maka perekonomian ditulungagung akan lebih stabil. Hal ini juga berdampak pada lembaga keuangan syariah yang bisa lebih stabil dalam menjaga NPF LKS mikro di Tulungagung. Alasan mengapa hal tersebut terjadi dikarenakan

⁴⁴Suminto, Moh Farih Fahmi, and Binti Mutafarida, “Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi,” *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4, no. 1 (April 23, 2020): 31–44, <https://doi.org/10.26740/JPEKA.V4N1.P31-44>.

tidak adanya pembatasan kegiatan ekonomi warga sehingga sektor ekonomi tidak ada dampak serius.

Berdasarkan kedua asumsi yang terjadi maka alternatif strategi yang bisa dipakai oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menghadapi pandemi di Tulungagung dapat disikapi dengan bijak dan beragam. LKS di Tulungagung dimasa covid-19 diharapkan mampu melakukan digitalisasi keuangan di Tulungagung. Mencoba memberikan kemudahan kepada nasabah muslim Tulungagung untuk meminta pembiayaan dengan fintech yang dioperatori oleh LKS Tulungagung. Sehingga dalam menghadapi pandemi, pelaku ekonomi di Tulungagung tidak perlu khawatir terkait dorongan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu, dengan adanya fintech syariah dari LKS yang ada di Tulungagung akan secara tidak langsung menghindarkan 10.000 lebih nasabah dari praktik – praktik keuangan yang tidak dihalalkan oleh Islam, seperti adanya riba pada lembaga keuangan. Oleh karena itu, baik dengan PSBB atau non-PSBB lembaga keuangan syariah di Tulungagung masih bisa mengoptimalkan kinerjanya selama masa pandemi karena mempunyai prinsip yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sehingga dimasa pandemi ini LKS masih mampu mengupayakan berjalannya kegiatan ekonomi dengan orientasi kemaslahatan, atau *maslahah*.

PENUTUP

Kesuksesan pemerintah dalam menghadapi dampak COVID-19 menurut hiscott secara umum dapat dilakukan dengan mengendalikan dua sektor, kesehatan dan ekonomi secara efektif. Sektor ekonomi yang menjadi kajian penelitian ini meniscayakan pentingnya peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan strategis. Situasi pandemi di seluruh wilayah, khususnya Tulungagung, belum bisa dipastikan akhirnya. Pengendalian situasi ini bisa dilakukan pemerintah melalui skenario yang diukur berdasarkan kajian kesiapan sektor ekonomi selama masa pandemi, *New Normal*, dan menuju fase normal. Skenario untuk menggambarkan kemungkinan situasi bisnis dan ekonomi ketika belum ditemukannya vaksin COVID-19 tergambar dalam dua skenario, yaitu skenario pertama dengan adanya PSBB dan skenario kedua dengan tanpa PSBB. Oleh karena itu, situasi dan model bisnis pasca COVID-19 di Tulungagung sangat tergantung dari dua skenario tersebut. Ada kemungkinan modifikasi ekonomi yang sukses akan memberikan dampak yang baik pada saat memasuki fase normal atau bahkan bisa lebih buruk. Meskipun harus disadari secara realistis, fase normal tidak akan pernah sebaik yang sudah terjadi sebelum adanya COVID-19.

Alternatif solusi yang efektif tentu harus dikuatkan dengan adanya lembaga keuangan yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dimasa pandemi covid-19. Lembaga keuangan tersebut harus berorientasi ajaran – ajaran Islam. sehingga ada kemaslahatan yang akan diterima oleh pelaku ekonomi di Tulungagung. Berdasarkan penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat tulungagung masih bisa memanfaatkan akses pada lembaga keuangan syariah (LKS) karena dimasa pandemi LKS tidak terlalu terdampak. Hal ini dikarenakan aktifitas di LKS tidak seberat yang ada diperbankan dan hanya bergerak disektor mikro. Selain itu, LKS bergerak dengan asas kemaslahatan, dimana dalam menghadapi covid-19 LKS di Tulungagung lebih bijaksana dalam memandang resiko bisnis nasabah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LKS di Tulungagung secara subjektif mampu bertahan dimasa pandemi dan mampu memberikan akses pembiayaan yang masih stabil dimasa pandemi.

SARAN

Kegiatan ekonomi yang sangat terganggu dengan adanya virus corona menjadikan dampak yang begitu besar bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu berdasarkan data maka penulis menyarankan untuk para pelaku ekonomi segera beradaptasi dengan dunia digital ekonomi, dengan memanfaatkan media sosial atau *startapp* yang sudah familiar di masyarakat dengan tetap patuhi protokol kesehatan agar sirkulasi ekonomi selama masa pandemi dapat terjaga. Di samping itu juga pemangku kebijakan dituntut untuk melakukan pilihan-pilihan startegi yang tepat dalam menghadapi situasi pandemi ini. Alternatif skenario ekonomi dalam artikel ini dapat dijadikan referensi untuk mengatasi gangguan COVID-19 pada sektor ekonomi di Tulungagung.

DAFTAR RUJUKAN

- Alisjahbana. *Urban Hidden Economy*. Surabaya: Lembaga Penelitian ITS, 2003.
- Aryani, Yulya, Lukytawati Anggraeni, and Ranti Wiliasih. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014.” *Al-Muzara’ah* 4, no. 1 (July 10, 2016): 44–60. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.44-60>.
- BPS Kabupaten Tulungagung. *Tulungagung Dalam Angka 2020*. Tulungagung: CV. Azka Putra Pratama, 2020.
- Dharmawan, Yogantara Setya. “Skenario Masa Depan Untuk Sektor Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Teknologi Aliansi Perguruan Tinggi (APERTI) BUMN*. Vol. 1, 2018.
- Dwihandayani, Deasy. “Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 22, no. 3 (February 23, 2018). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1759/1518>.
- Engkus. “Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat.” *LITIGASI* 18, no. 1 (2017): 2442–2272.
- Gabby, Maria. “Prinsip Evidence Based Policy Making Dalam Konteks Audit Pendahuluan Operasional BPJS Kesehatan.” *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*. Vol. 2, May 1, 2015. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/314>.
- Gössling, Stefan, Daniel Scott, and C. Michael Hall. “Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19.” *Journal of Sustainable Tourism*, 2020, 1–20. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708>.
- Han, Yu, and Hailan Yang. “The Transmission and Diagnosis of 2019 Novel Coronavirus Infection Disease (COVID-19): A Chinese Perspective.” *Journal of Medical Virology* 92, no. 6 (June 1, 2020): 639–44. <https://doi.org/10.1002/jmv.25749>.
- Maryanti, Sri, I Gusti Ayu Oka Netrawati, and I Wayan Nuada. “Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Pada Perekonomian NTB.” *Open Journal*

- Systems* 14, no. 11 (June 2, 2020): 3497–3508. <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/>.
- Muhyiddin. “Covid-19, New Normal, Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia.” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (June 8, 2020): 240–52. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>.
- Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 2 (June 1, 2020): 240–49. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>.
- Smith, Adrian F. M. “Mad Cows and Ecstasy: Chance and Choice in an Evidence-Based Society.” *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (Statistics in Society)* 159, no. 3 (May 1, 1996): 367. <https://doi.org/10.2307/2983324>.
- Stojkoski, Viktor, Zoran Utkovski, Petar Jolajoski, Dragan Tevdovski, and Ljupco Kocarev. “The Socio-Economic Determinants of the Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic.” *SSRN Electronic Journal*, April 14, 2020. <http://arxiv.org/abs/2004.07947>.
- Suminto, Moh Farih Fahmi, and Binti Mutafarida. “Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi.” *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4, no. 1 (April 23, 2020): 31–44. <https://doi.org/10.26740/JPEKA.V4N1.P31-44>.
- Taufik, and Eka Avianti Ayuningtyas. “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online.” *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 22, no. 01 (April 30, 2020): 21. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i01.389>.
- Tulungagung, BPS Kabupaten. *Tulungagung Dalam Angka Tahun 2019*. Tulungagung: Badan Pusat Statistik Tulungagung, 2019.
- Waliul Hasanat, Mohammad, Ashikul Hoque, Farzana Afrin Shikha, Mashrekha Anwar, Abu Bakar Abdul Hamid, and Huam Hon Tat. “The Impact of Coronavirus (Covid-19) on E-Business in Malaysia.” *Asian Journal of Multidisciplinary Studies* 3, no. 1 (April 5, 2020): 85–90. <https://asianjournal.org/online/index.php/ajms/article/view/219>.